

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI IMPLEMENTASI KONSEP PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DI INDONESIA

Adhiwisata Tappangan (2210622094), Supardi, Beniharmoni Harefa

Tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* yang menimbulkan kerugian keuangan negara, menghambat pembangunan nasional, dan merugikan masyarakat. Namun, penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih didominasi pendekatan retributif yang berorientasi pada pidana penjara, sementara pemulihan kerugian negara belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan tindak pidana korupsi dan pemulihan kerugian negara di Indonesia saat ini serta mengkaji penerapan prinsip *restorative justice* sebagai alternatif pemidanaan di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh formulasi hukum yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *asset recovery* dalam perkara korupsi belum berjalan optimal karena penegakan hukum masih berfokus pada pemidanaan pelaku. Penerapan prinsip *restorative justice* dapat menjadi alternatif dengan menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama tanpa menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Konsep yang ditawarkan adalah penggantian kerugian negara sebesar empat kali lipat dari nilai kerugian yang ditimbulkan guna meningkatkan efek jera dan efektivitas pemulihan keuangan negara. Disimpulkan bahwa reformulasi Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 diperlukan untuk memperkuat *asset recovery*. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu mengatur mekanisme pemulihan kerugian negara yang lebih efektif melalui pendekatan *restorative justice*.

Kata Kunci: *Restorative Justice*; Tindak Pidana Korupsi; Pemulihan Kerugian Negara; *Asset Recovery*.

ABSTRACT

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES IN THE HANDLING OF CORRUPTION CRIMES: A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF STATE LOSS RECOVERY AS AN ALTERNATIVE TO CRIMINAL PUNISHMENT IN INDONESIA

Adhiwisata Tappangan (2210622094), Supardi, Beniharmoni Harefa

Corruption is an extraordinary crime that causes state financial losses, obstructs national development, and harms society. However, the handling of corruption cases in Indonesia remains dominated by a retributive approach that focuses on imprisonment, while the recovery of state losses has not been optimal. This study aims to analyze the current handling of corruption crimes and the recovery of state losses in Indonesia, as well as to examine the application of restorative justice principles as an alternative sentencing approach in the future. This study uses normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed qualitatively to formulate legal concepts that align with the objectives of the study. The findings show that the asset recovery mechanism in corruption cases has not worked optimally because law enforcement still focuses on punishing offenders. The application of restorative justice principles may serve as an alternative by placing the recovery of state losses as the main objective without eliminating the criminal liability of the offender. The concept proposed in this study is the repayment of state losses at four times the value of the losses caused, in order to strengthen deterrence and improve the effectiveness of state financial recovery. This study concludes that the reformulation of Article 4 of Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes, as amended by Law Number 20 of 2001, is necessary to strengthen asset recovery. Therefore, lawmakers need to regulate a more effective mechanism for recovering state losses through a restorative justice approach.

Keywords: *Restorative Justice; Corruption; State Loss Recovery; Asset Recovery.*